

BAB II

STRUKTUR DARFUR

DAN PEMERINTAHAN OMAR HASSAN BASHIR

Darfur merupakan salah satu kawasan di negara Sudan yang dihuni oleh berbagai macam suku/ etnis. Etnis-etnis tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu etnis Afrika Hitam dan Afrika Arab. Bab ini akan diawali dengan menjelaskan makna strategis kawasan Darfur baik secara geografis, sosial-budaya, maupun ekonomi, sejarah Darfur sebagai bagian dari Sudan. Kemudian memaparkan pemerintahan Omar Hassan Bashir serta hubungannya dengan Darfur.

A. Makna Strategis Darfur

Darfur dalam bahasa Arab : دار فور *dār fūr*²⁴, berarti “Tanah orang Fur” terletak di Republik Sudan bagian barat. Orang-orang Fur adalah orang-orang muslim non-Arab. Mata pencaharian penduduk Darfur adalah penggembala ternak yang sebagian besar adalah orang etnis Arab dan petani yang didominasi oleh penduduk asli Afrika. Secara geografis letaknya terisolasi dengan ibukota Khartoum. Hal ini menyebabkan Darfur menjadi daerah yang terbelakang di Sudan.

Darfur adalah sebuah daerah terpencil dalam negara Sudan karena secara geografis wilayah ini terpisah dari Ibukota Khartoum. Sebelum merdeka dari jajahan Inggris sistem pemerintahan Sudan adalah sistem pemerintahan lokal yang melibatkan pemimpin-pemimpin suku dalam pemerintahan lokal. Namun setelah Sudan memperoleh kemerdekaannya pada 1956 sistem pemerintahan terpusat ke Khartoum. Hal ini menyebabkan wilayah Darfur terabaikan dan semakin terpuruk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

1. Keadaan Geografis Darfur

Darfur sebagai salah satu kawasan terluas di Sudan memiliki wilayah seluas 493.180 km² atau sekitar 20% dari wilayah Sudan. Darfur terletak di Sudan bagian barat yang berbatasan dengan Negara Libya, Chad dan Republik Afrika Tengah. Darfur secara geografis merupakan daerah pegunungan dan gurun pasir yang memiliki musim ekstrim karena pada Juli-Oktober musim panas (kemarau), November-Maret musim dingin, April-Juni musim hujan. Suhu rata-rata di siang hari antara 40°C-50°C sedangkan di malam dan pagi hari antara 5°C-15°C.²⁵

Ada empat karakter utama kondisi geografis Darfur. Bagian timur seluruh Darfur ditutupi dataran rendah dan perbukitan berpasir yang dikenal sebagai goz, dan bukit-bukit batu pasir. Di banyak tempat goz ini tanpa air dan hanya dapat dihuni bila terdapat air waduk, namun meskipun kering goz dapat ditumbuhi rumput karena tanahnya subur. Untuk utara goz, sudah berbatasan dengan gurun

²⁵ Indonesian Formed police Unit (FPU): *Ist in Action in El Fasher Darfur Sudan*, *Indonesian Formed Police Unit (FPU) in Sudan* (2008/11/14) <http://www.fpu.org>, diakses 24

pasir Sahara. Karakter kedua adalah wadi, menjadi sungai musiman yang kadang-kadang banjir selama musim hujan bahkan sebagian besar hujan dan aliran airnya mengalir ke Danau Chad. Darfur Barat didominasi karakter ketiga yaitu berupa batuan dasar, kadang-kadang tertutup dengan lapisan tipis tanah berpasir yang cocok untuk beternak. Karakter terakhir adalah Pegunungan Marra yang banyak curah hujan, kaya cadangan minyak dan lebih subur dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Darfur.

2. Wilayah Darfur

Pada tahun 1986 pemerintahan Sudan di bawah Sadiq Al Mahdi mengusulkan untuk memecah Darfur menjadi tiga wilayah. Namun kebijakan ini baru direalisasikan semasa pemerintahan Presiden Omar Hassan Bashir pada tahun 1994. Darfur dibagi menjadi tiga bagian yaitu Darfur Utara (Shamal Darfur) beribukota Al Fasher, Darfur Selatan (Janub Darfur) beribukota Nyala dan Darfur Barat (Gharb Darfur) beribukota Geneina.

a. Darfur Barat (Gharb Darfur)

Darfur Barat memiliki luas sekitar 79.640 km² beribukotakan Geneina. Secara etnis terdapat etnis Afrika Hitam dan Afrika Arab, namun etnis Afrika Hitam lebih mendominasi wilayah ini. Di provinsi Genia dan Habila etnis Masalit adalah kelompok mayoritas (60%), kemudian diikuti etnis Afrika Arab dan Afrika Hitam yang lain seperti Zaghawa, Erengga, Gimr, Dajo, Borgo dan Fur. Sedangkan etnis Fur banyak mendominasi kawasan di provinsi Zalingei, Jebel Marra dan Wadi Salih. Di provinsi Kulbus mayoritas

penduduknya adalah etnis Girm (50%), Erennga (30%), Zaghawa (15%) etnis Afrika Arab (5%). Bisa dilihat bahwa etnis Fur dan Masalit mendominasi populasi penduduk di Darfur Barat.

Darfur Barat terkenal sebagai salah satu wilayah yang kaya pertanian di Sudan, hal tersebut didukung oleh tanah yang subur dan air yang mencukupi daerah tersebut. Sumber air melimpah dikarenakan tingginya curah hujan di daerah barat ini pada bulan Juni hingga Oktober. Oleh karena etnis Fur, Masalit dan etnis Afrika Hitam lainnya mendiami Darfur mayoritas berprofesi sebagai petani. Menurut sejarah terjadi perselisihan sehubungan dengan perebutan lahan pertanian, menggembala serta cadangan air antara etnis Afrika Hitam dan Afrika Arab yang menyulut pertikaian di kawasan Darfur ini.

b. Darfur Utara (Shamal Darfur)

Wilayah Darfur Utara memiliki luas sekitar 296.420 km² beribukota Fasher. Wilayah Darfur Utara dihuni oleh dua kelompok besar dari etnis Fur dan Zaghawa, serta enam kelompok minoritas lainnya yaitu Meydot, Bargo, Borgo, Gomor, Bedyat. Darfur Utara terletak kurang lebih 400 km dari ibukota Sudan (Khartoum). Wilayah ini secara geografis didominasi oleh hamparan padang pasir yang luas sehingga akses ke Darfur Utara terganggu.

c. Darfur Selatan (Janub Darfur)

Wilayah Darfur Selatan memiliki luas sekitar 127.300 km² beribukota Nyala. Wilayah ini didominasi oleh etnis Fur dan Masalit.

Di'ain, Bram, Kas, 'Id Firsan, Gireida, Shi'eria dan Firdos. Pertanian merupakan salah satu hasil bumi terbesar yang dihasilkan daerah ini. Adanya tambang minyak menjadikan daerah ini sangat potensial dan strategis dalam mambantu perekonpomian negara Sudan.

3. Etnisitas dan Perekonomian Darfur

Populasi penduduk Darfur sekitar 6 juta jiwa²⁶ atau sekitar sepertujuh dari total penduduk Sudan sebesar 43.939.598 jiwa pada Juli 2010.²⁷ Darfur terdiri dari beberapa suku yang semuanya beragama islam dan mereka bekerja sebagai petani dan pengembala unta serta sapi. Mayoritas suku yang bekerja sebagai petani adalah suku Fur dan Masalit, dan mayoritas suku yang bekerja sebagai pengembala adalah suku Zaghawa, Baqqaram dan Abbala. Suku-suku Afrika Hitam yang mendiami Darfur yaitu Fur, Masalit, dan Zaghawa; sedangkan suku Afrika Arab pendatang sejak abad ke-13 adalah Baqqaram.

a. Etnisitas Darfur

Secara umum etnisitas di Darfur digolongkan ke dalam dua kelompok besar yaitu etnis Afrika Hitam dan Afrika Arab. Keanekaragaman etnis yang mendiami Darfur membuat beberapa sosiolog mengelompokkan masyarakat di Darfur berdasarkan mata pencaharian, etnis dan bahasa. Berdasarkan mata pencahariannya, Ahmed dan Harir (1982) membagi populasi darfur menjadi

²⁶ Prince of Jihad, *Darfur dan Air Mata Buaya*, <http://arrahmah.com/index.php/blog/read/3590/darfur-dan-air-mata-buaya>, diakses 24 November 2010

²⁷ *The World Factbook: Sudan*(online) <http://www.cia.gov/cia/publication/factbook/goes/su.html>.

empat kelompok yaitu : Baggaram (penggembala lembu), Aballa (penggembala unta), Zurga (nama lokal untuk para petani non-Arab yang diambil dari bahasa Arab untuk menyebut orang Afrika Hitam) dan penduduk yang tinggal di pinggiran kota.²⁸

Berdasarkan bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat Darfur, Ibrahim (1984) membaginya menjadi empat kelompok yaitu Arab, Arab Penuh (*the total Arab*), Arab Sebagian (*the partly Arab*) dan non-Arab. Arab menurut Ibrahim adalah mereka yang berbicara menggunakan bahasa Arab asli seperti etnis Rezeigat, Zeiydiya, Beni Hussein dan Djawama (pengembara sebagai hasil perkawinan dengan orang pribumi Darfur, kulit mereka kelihatan lebih gelap dibanding etnis non-Arab Sudan). Kelompok Arab Penuh, mengacu pada penduduk lokal Darfur yang sudah kehilangan bahasa aslinya dan menggunakan bahasa Arab seperti etnis Berti dan Tungur. Kelompok Arab Sebagian, terdiri dari mereka yang tetap mempertahankan bahasa pribumi mereka tapi juga mampu berbicara Arab dengan fasih seperti etnis Fur, Zaghawa dan Meidob. Kelompok terakhir adalah kelompok non-Arab di mana mereka sangat sedikit sekali menggunakan bahasa Arab seperti etnis Masalit, serta sebagian Zaghawa, Bergid, Mima, Tama dan Kenana.²⁹

b. Perekonomian Darfur

Seperti kebanyakan keadaan di Sudan, perekonomian Darfur ditopang dari produksi pertanian seperti sorga, buah-buahan, tembakau, dan di bagian utara

berupa hasil ternak. Wilayah Darfur bagian selatan dan barat memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, emas, besi, kromium, marmer, granit, tembaga, uranium, seng, nikel dan juga timah. Hasil-hasil pertanian seperti kapas, padi, dan rempah-rempah.

Namun sayangnya masyarakat Darfur kurang mendapatkan manfaat sumber daya alam yang mereka miliki. Masih kuatnya pengaruh Inggris pada sistem ekonomi Sudan dimana pembangunan ekonomi berpusat di utara Khartoum menyebabkan sektor ekonomi Darfur didomestikasi masyarakat Afrika Arab. Hal tersebut berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat Afrika Hitam di Darfur yang kian memprihatinkan.

B. Sejarah Darfur Sebagai Bagian dari Sudan

Sebagian besar Darfur merupakan daerah gurun yang gersang yang kurang mendukung terciptanya peradaban. Namun ada suatu kawasan Darfur yang menawarkan air melimpah yaitu Pegunungan Marra (Jabel Marra), dan di sini orang-orang Daju menciptakan peradaban Darfurian pertama kali sebelum di pegunungan. Selanjutnya datanglah pengungsi Daju, Tunjur dan Higal (dari Arabia dan Mesir) pada abad ke-13 dan mulai memperkenalkan Islam di Darfur.

Berdasarkan sejarah bangsa Arab mulai masuk ke Darfur dan

abad ke-13 di mana instabilitas sosial dan politik banyak sekali terjadi akibat perbutan kekuasaan dan mulai melemahnya kekuasaan musim Arab.³⁰ Hal tersebut menyebabkan banyak orang Arab yang mengungsi dan akhirnya menetap di Darfur. Kelompok bangsa Arab tersebut ada yang hidup dan kemudian beranak pinak dengan keturunan suku pribumi yang mendiami Darfur, di mana mereka tinggal secara berpindah tiap musimannya untuk mencari tanah penggembalaan yang subur. Suku Arab Baggaram³¹ mengikuti gaya hidup berkelana dengan beternak sapi bukannya biri-biri atau unta. Bangsa Arab yang tinggal di Sudan Barat ini disebut juga Baggaram yang artinya penggembala lembu, yang meliputi etnis Rizeigat dan Misseiria.

Sementara kawasan Darfur itu sendiri banyak dihuni bangsa Fur. Bangsa Fur termasuk golongan Black African atau orang Afrika berkulit hitam yang setia mempertahankan tradisinya secara turun menurun dan mereka mayoritas hidup sebagai petani. Dalam kehidupan sehari-hari mereka berdialog dengan menggunakan bahasa Fur dan umumnya menempati daerah di sekitar pegunungan Marra yang subur.

Darfur menjadi kekuatan besar dibawah dinasti Keira, memperluas perbatasannya sejauh timur seperti Sungai Atbarah dan menarik imigran dari Bornu dan Bagirmi. Selama pertengahan abad ke-18 kawasan Darfur didera oleh konflik antara faksi-faksi saingan dan perang eksternal dengan Sennar dan Wadai.

³⁰ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Kaldun dan Pola Pemikiran Islam* (Pustaka Firdaus, 1989) hal.9

³¹ *Gelecia Internacional Inc. Negara dan Bangsa Afrika, Jilid 1* (Jakarta: PT Ikcar Mandiri, 1998)

Pada tahun 1875 kerajaan melemah kemudian dihancurkan oleh penguasa Mesir, yang pada akhirnya para Darfurians gelisah dibawah pemerintahan Mesir.

Namun setelah Inggris menginvasi Mesir pada 1882 kekuasaan Mesir atas Darfur mulai melemah. Tak lama kemudian Inggris juga memperluas kekuasaannya ke Sudan.³² Selama Perang Dunia I Inggris khawatir bahwa kesultanan Darfur mungkin jatuh dibawah pengaruh Kekaisaran Ottoman (Turki), maka Inggris mulai menginvasi dan memasukkan Darfur ke wilayah Sudan Anglo-Mesir pada tahun 1916. Kekuasaan Inggris di Sudan memberikan berbagai bentuk baru dalam berbagai aspek kehidupan terutama pada permasalahan ekonomi, agama dan sistem pemerintahan parlementer. Inggris menciptakan administrasi yang dapat membiayai sendiri secara finansial wilayah Utara/Khartoum.³³

Ketika Darfur dikuasai langsung oleh Inggris sejak 1916. Diantara kebijakan Inggris adalah membangun pemerintahan dan administrasi Sudan termasuk Darfur dengan dasar pemisahan Selatan dari Utara dan kekuasaan yang didasarkan pada sukuisme dimana pemimpin suku seakan menjadi penguasa riil atas sukunya. Di Darfur terdapat sekitar 85 suku (kabilah). Pemerintahan dan administrasi berdasar kesukuan inilah yang menancapkan paham kesukuan (*qawmiyah qabaliyah*).

³² George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1993) hal.298

³³ Saptoto Adi Pamungkas, *Peran IGAD dalam Penyelesaian Konflik Sudan Selatan* (Tesis Ilmu Hubungan Internasional IGM, 2010, Yogyakarta) hal.24-25

Hal itu menjadikan masing-masing suku merasa menjadi penguasa atas daerahnya dan merasa seluruh tanah daerah itu dan kekayaannya adalah milik mereka. Sementara kehidupan suku-suku itu banyak yang bersifat semi nomaden, terutama suku Baggaram yang profesinya beternak. Diantara suku-suku itu sejak dahulu terjadi perselisihan. Darfur sendiri artinya negeri Fur dinisbatkan kepada Fur, nama suku yang mendiami wilayah tersebut. Lalu datang suku berdarah Arab dan ikut bersama-sama dengan Fur dalam hal kehidupan, agama dan wilayah. Sebagian suku Arab yang beternak ingin menguasai padang rumput untuk gembalaan ternak mereka, sementara sebaliknya suku Fur yang berdarah Afrika dan mayoritasnya petani menolak berbagai tanah dan padang rumput dengan suku-suku Arab karena menganggap tanah dan padang rumput itu adalah milik mereka dari warisan nenek moyang.³⁴

Dibawah kekuasaan kolonial Inggris, sumber daya keuangan dan administrasi diarahkan oleh suku-suku Arab di Khartoum untuk membangun kawasan Khartoum sebagai pusat pemerintahan, politik, ekonomi dan perdagangan sehingga merugikan daerah terpencil seperti Darfur. Pemusatan kekuasaan tersebut terus berlanjut hingga Sudan memperoleh kemerdekaan pada 1956.

³⁴ *Maklumat Politik Sudan*, <http://bizbut-tahrir.or.id/2008/08/14/maklumat-politik-sudan/>, diakses

C. Pemerintahan Omar Hassan Bashir

Sudan merupakan negara multi-etnis dan multi-agama yang memiliki ketimpangan kelas sosial ekonomi antara kaum Afrika Arab dan Afrika Hitam. Sudan atau dalam bahasa Arab “Bilad as Sudan” yang berarti Land of Black mempunyai nama resmi Republik Sudan, saat ini dipimpin oleh Presiden Omar Hassan Bashir sejak 30 Juni 1989. Sejak meraih kemerdekaannya dari penjajahan Mesir dan Inggris pada 1 Januari 1956, Sudan dilanda oleh berbagai macam krisis. Meskipun Sudan adalah pengeksport bahan makanan dan minyak bumi tetapi pada tahun 1993 Sudan menjadi negara dengan jumlah pinjaman terbanyak kepada bank dunia dan IMF, hingga untuk pertama kalinya perekonomian Sudan membaik pada tahun 2000-2001.

Namun hal ini tidak diikuti dengan stabilitas keamanan dalam negeri sehingga memunculkan pergolakan di beberapa kawasan Sudan. Rezim militer menyokong pemerintahan yang berorientasi Islam, telah mendominasi politik nasional Sudan sejak tahun 1956. Sudan telah terlibat dalam dua perang saudara yang panjang pada abad 20. Konflik-konflik ini mengakar pada masalah dominasi ekonomi, politik dan sosial. Konflik separatis yang muncul di wilayah Sudan Selatan dan konflik etnis di Darfur .

1. Latarbelakang Omar Hassan Bashir

Omar Hassan Bashir lahir pada bulan Januari 1944 di sebuah desa di Sudan Utara. Jendral Bashir bergabung dengan angkatan bersenjata Sudan pada

tahun 1960 dan lulus dari Akademi Militer Sudan di Khartoum pada tahun 1966.³⁵ Kiprahnya dalam militer terus meningkat seiring dengan banyaknya peperangan yang terjadi di sekitar kawasan Sudan. Bashir pernah bergabung dalam garda depan angkatan bersenjata Mesir selama perang Arab-Israel pada Oktober 1973, masuk dalam atase militer di Uni Emirat Arab (1975-1979) dan menjadi kepala brigade parasut lapis baja di Khartoum (1981-1987). Bahkan dari tahun 1989 hingga 1993 kedudukan Menteri Pertahanan Sudan dipegang oleh Omar Hassan Bashir.

Sejak meraih kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1956 sejarah Sudan terus diwarnai konflik politik dan etnis antara pemerintah, kelompok oposisi serta kalangan pemberontak. Situasi tersebut menyebabkan pembangunan daerah-daerah di kawasan Sudan tersendat dan upaya perdamaian nasional menjadi terhambat. Didorong oleh situasi yang nyaris membawa kehancuran Brigjen Omar Hassan Ahmad Al Bashir dengan dukungan beberapa perwira serta *National Islamic Front* (NIF) pimpinan Hassan Abdullah Turabi, melancarkan kudeta tak berdarah pada tanggal 30 Juni 1989 dari pemerintahan koalisi Partai Persatuan Demokrasi/ *Democratic Unionis Party* (DUP) dan Partai Umma/ *Umma Party*. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Revolusi *Al Inqaz Al Wathoni* atau Revolusi Penyelamat Nasional.³⁶

³⁵ *Profile: Sudan's President Bashir*, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3273569.stm>, diakses 16 Maret 2011

³⁶ *Dinamika Perpolitikan di Sudan*, <http://pks->

Hal pertama yang dilakukan oleh Presiden Bashir adalah membubarkan seluruh partai politik dan membentuk Kongres Nasional sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat. Selanjutnya kekuasaan dipegang oleh Dewan Komando Revolusi (DKR) yang diketuai Presiden Bashir. Dewan Komandi Revolusi mempunyai wewenang mengeluarkan kekuasaan legislatif dan eksekutif serta menetapkan perubahan, pengangkatan serta pemberhentian pejabat negara.³⁷ Akhirnya pada Oktober 1993 pemerintah membubarkan DKR dan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen sementara sebagai perwakilan rakyat Sudan. Hal tersebut dilakukan guna meredam adanya tuduhan masyarakat internasional atas pemerintahan militer di Sudan.

2. Politik dan Pemerintahan Sudan

a. Konstitusi

Konstitusi pertama Sudan dibuat tanggal 12 April 1973 pada masa pemerintahan Presiden Nimeiri. Namun pada April 1985 dibekukan oleh Jenderal Abdurrachman Suar El Dahab (Menteri Pertahanan) yang mengkuadeta Presiden Nimeiri. Konstitusi baru terbentuk setelah Letjen Omar Hassan Bashir tampil sebagai presiden. Sebelum Konstitusi lama dibubarkan, Dewan Komando Revolusi Penyelamat Rakyat (Al Inqaz Al Wathan) menyusun Konstitusi baru yang berdasarkan Syariah Islam sebagai sumber hukum dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pada 30 Juni

1998 Presiden Omer Al Bashir resmi memberlakukan Konstitusi baru

tersebut setelah mendapatkan dukungan rakyat melalui referendum pada bulan Mei 1998.

b. Sistem Pemerintahan

Menurut Bab I pasal 2 Konstitusi baru 1998 menyebutkan bahwa, Republik Sudan adalah negara Federal dan menganut sistem pemerintahan Presidensial. Adapun sumber hukumnya adalah Hukum Islam (Syariah), Konstitusi dan konsensus nasional. Dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh 2 orang wakil presiden, menteri-menteri, menteri negara dan penasehat presiden setingkat menteri yang seluruhnya bertanggung jawab kepada presiden.

Bab IV pasal 108 mengatur tentang pembagian Sudan menjadi 26 negara bagian/ provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Pembagian wilayah tersebut dimaksudkan untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Sudan.

Setelah pembentukan badan legislatif dan eksekutif di tingkat Pusat (Khartoum) selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2005, Wapres I dan Kepala Pemerintahan Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit melalui Dekrit Presiden No.4 menetapkan 22 Kementerian untuk pemerintahan Sudan Selatan. Posisi Kementerian tersebut akan dibagi oleh SPLM, PKN dan Parpol Selatan. Berdasarkan Kesepakatan Persetujuan Damai (CPA) dan pasal 162 Konstitusi Interim Sudan tahun 2005 tentang Pemerintah Sudan

Selatan, SPLM mendapat jatah 70 % untuk badan eksekutif, PKN 15% dan parpol selatan lainnya sebesar 15%.

c. Sistem Kepartaian

Di awal pemerintahannya (1989) Presiden Omar Hassan Bashir membubarkan seluruh partai politik. Maka untuk menampung aspirasi politik masyarakat dibentuklah Kongres Nasional yang selanjutnya menjadi Partai Kongres Nasional/ *National Congress Party* (NCP) dan diketuai oleh Presiden Bashir dan Dr. Hassan Abdalla Turabi sebagai Sekjen. Pendirian NCP menimbulkan antipati Dr. Hassan Abdalla Turabi terhadap Presiden. Untuk menghindari dualisme kepemimpinan, Presiden Bashir mengeluarkan Dekrit yang membubarkan Parlemen serta menghentikan Turabi sebagai Sekjen NCP. Turabi kemudian mendirikan Partai Kongres Rakyat Nasional/ *Party Nasional Congress People* (PNCP) dan bersama-sama dengan kelompok oposisi lain mengkritik pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan keterbukaan dan demokratisasi Pemerintahan Bashir memberlakukan undang-undang organisasi politik pada Januari 1999 yang menjamin kebebasan rakyat menyalurkan aspirasi politik mereka melalui partai-partai politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Mei 1999 untuk pemilihan anggota Parlemen dan Presiden. Dengan terbitnya dua undang-undang tersebut serta imbauan pemerintah kepada tokoh-tokoh politik yang berada di pengasingan telah dapat menarik mereka kembali ke Sudan antara lain Ketua Partai Umma/ mantan Perdana

Menteri, Sadiq Al Mahdi dan Mantan Presiden Ali Ahmed Mirghani dari Mesir pada tahun 2000 dan 2001.

Kelompok oposisi menilai Undang-undang Dasar dan Undang-undang Pemilu 1999 tidak mencerminkan demokrasi karena itu mereka memboikot Pemilu tanggal 13-22 Desember 2000 yang hanya diikuti oleh 3 dari 27 parpol yang terdaftar yaitu : Partai Kongres Nasional (PKN), Front Penyelamat Demokrasi (FPD) dan Partai Serikat Pekerja (PSP). Partai-partai oposisi yang terdaftar tetapi tidak ikut dalam Pemilu antara lain Partai Kongres Rakyat Nasional (PNCP), Partai Persatuan Penyelamat Demokrasi (USDP), Partai Umma (UP), Partai Arab Baath Jordan (JBAP), Partai Persatuan Sudan-Afrika (USAP), Partai Kemerdekaan Nasional Sudan (SNFP), Partai Persatuan Demokrasi (DUP), dan Partai Komunis Sudan (SCP).

d. Sistem Peradilan

Dalam UU Nomor 13 Tahun 1994 menyebutkan bahwa sistem peradilan Sudan adalah independen. Praktek peradilan dilakukan oleh para hakim yang tergabung dalam Dewan Kehakiman. Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan tersebut bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kehakiman diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Parlemen. Presiden juga mengangkat para hakim atas usulan Dewan Kehakiman. Disamping itu Ketua Dewan Kehakiman juga merangkan

sebagai Ketua Mahkamah Agung. Dewan Kehakiman terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu Dewan Kehakiman Pusat, Dewan Kehakiman Negara Bagian dan Dewan Kehakiman Propinsi.

3. Perekonomian Sudan

Dahulunya Sudan merupakan salah satu negara terbelakang dan termiskin di dunia. Namun sejak ditemukannya ladang minyak di Sudan perekonomian Sudan meningkat, terlebih dengan tingginya produksi minyak dan harga minyak dunia yang kian melambung. Meski demikian garis kemiskinan masyarakat Sudan meningkat karena konflik internal yang menimbulkan perang saudara selama dua dekade di Selatan.

Selain minyak, hasil pertanian juga merupakan sumber penting bagi perekonomian masyarakat Sudan. Kapas dan wijen menghasilkan hampir seperempat dari setiap pendapatan ekspor, selain itu Sudan juga merupakan negara pengekspor bahan makanan seperti padi-padian, gandum, dan kacang-kacangan serta hasil peternakan ke Mesir, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya. Walaupun demikian, pertanian Sudan masih memiliki masalah irigasi dan transportasi yang sangat mengganggu kelancaran perekonomian.

Perkembangan industri Sudan terdiri atas pemrosesan hasil-hasil pertanian dan berbagai macam industri yang terletak di Khartoum Utara. Pada beberapa tahun terakhir, industri Sudan memperkenalkan pabrik perakitan mobil dan truk, dan beberapa peralatan berat militer. Meskipun Sudan memiliki reputasi sebagai pemilik sumber mineral terbesar, eksplorasinya masih cukup terbatas. Asbes, chrom, dan mika dieksploitasi secara komersial

Eksplorasi minyak bumi dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan menutupi seluruh keperluan energi dan ekonomi masyarakat Sudan. Sejumlah minyak mulai dikomersialkan untuk kepentingan ekspor pada tahun 2000 sehingga mengurangi impor bahan bakar minyak. Menurut data tahun 2009 Sudan memproduksi minyak sekitar 486.700 barel setiap hari.³⁸ Daerah yang diidentifikasi memiliki sumber minyak potensial berada di Sudan Selatan yaitu daerah Kordofan dan Propinsi Laut Merah.

Menurut sejarah, negara-negara seperti Amerika, Belanda, Italia, Jerman, Arab Saudi, Kuwait dan negara-negara pengeksport minyak lainnya (OPEC) telah menyediakan bantuan ekonomi ke Sudan. Peran Sudan sebagai mata rantai ekonomi antara Arab dan negara-negara di Afrika direfleksikan dengan munculnya *Arab Bank for African Development* di Khartoum. Bank Dunia merupakan penyedia pinjaman yang terbesar.

Meski Sudan menjadi peminjam terbesar di dunia kepada Bank Dunia dan IMF pada 1993, hubungannya dengan institusi keuangan internasional tersebut memburuk dikarenakan gagalnya Sudan membayar hutang-hutang tersebut. Pemerintah melanggar batas pelunasan program bantuan IMF. Rencana 4 tahun reformasi ekonomi yang telah diperkenalkan pada tahun 1988 tidak berhasil. Total hutang luar negeri Sudan melebihi 24 miliar dolar dan inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang-barang menjadi sulit dijangkau oleh konsumen Sudan

Pada tahun 1993 nilai mata uang Sudan jatuh, sehingga mempengaruhi devisa negara. Pada 1999 perdagangan liberal menjadi agak terbatas. Ekspor produksi-produksi selain minyak menjadi stagnan. Sebaliknya penemuan-penemuan pusat minyak di Selatan membawa harapan baru bagi keselamatan perekonomian Sudan. Namun pada kenyataannya, harapan tersebut sulit diwujudkan bahkan sampai situasi politik menjadi stabil.

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi minyak bumi di Sudan adalah *Talisman Energy* (Kanada), *Petronas Carigali of Malaysia*, *Petrochina* (anak perusahaan China National Petroleum Company) dan *Sudapet* atau Sudan Petroleum (perusahaan minyak pemerintah Sudan). Perusahaan-perusahaan ini bergabung dalam konsorsium yang bernama *Greater Nile Operating Company* (GNOC). Saham mayoritas konsorsium ini dipegang oleh *Petrochina* (40%), *Petronas* (30%), *Talisman* (25%), dan *Sudapet* (5%).³⁹

Perusahaan-perusahaan minyak Barat hanya sedikit yang beroperasi di Sudan dikarenakan adanya ketegangan politik antara Amerika dan Pemerintah Sudan sehingga Presiden Bill Clinton menjatuhkan embargo dan menghalangi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk berdagang di Sudan pada tanggal 3 November 1997. Pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa pemerintah Sudan memberikan dukungan kepada terorisme internasional, mengganggu stabilitas negara-negara tetangganya, dan mengizinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran

³⁹ Budi Rachmad Suryasaputra, *Krisis Darfur dan Kepentingan Amerika Serikat*, <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-QOT-Fw-Krisis-Darfur-dan-Kepentingan-Amerika>

HAM. Sebagai konsekuensinya perusahaan-perusahaan AS tidak dapat berinvestasi dalam industri minyak di Sudan.⁴⁰

Pada tahun 2000-2001 perekonomian Sudan mengalami peningkatan untuk pertama kalinya sejak memperoleh kemerdekaan yaitu peningkatan produksi minyak, bangkitnya industri ringan dan perkembangan zona industri pengolahan yang membantu menopang pertumbuhan GDP sekitar 10% pada tahun 2006. Produksi pertanian merupakan sektor terpenting di Sudan karena menyumbang 35% dari GDP dan menyerap 80% dari tenaga kerja, tetapi sebagian besar tanah pertanian di Sudan masih tergantung pada curah hujan dan rentan terhadap kekeringan.⁴¹ Konflik internal di Sudan yang tidak kunjung berakhir dan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan menyebabkan penduduk Sudan berada di bawah garis kemiskinan selama bertahun-tahun. Sejak Januari 2007 pemerintah mengenalkan mata uang baru yaitu *Sudanese Pound* menggantikan *Sudanese Dinar* dan pada bulan Juli 2007 *Sudanese Pound* menjadi satu-satunya mata uang Sudan.⁴²

4. Militerisme Sudan

Disamping wilayah, penduduk serta pengakuan dari dunia internasional, sebuah negara yang berdaulat untuk menjaga eksistensi, kedaulatan dan keamanan wilayahnya dipastikan memiliki kekuatan militer. Dalam bidang militerisme Pemerintah Sudan memiliki sejumlah pasukan militer diantaranya angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara dan sejenis milisi bersenjata.

⁴⁰Economy of Sudan. <http://en.wikipedia.org/wiki/Sudan>, diakses 23 November 2010

Karakteristik yang mencolok dalam bidang kemiliteran Sudan yaitu adanya keterlibatan rakyat atau yang sering disebut dengan milisi dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Keterlibatan rakyat atau milisi ini menurut sejarah dibentuk ketika Pemerintah Numeiri (awal tahun 1980-an menguasai Sudan. Kondisi Sudan yang terus dilanda konflik dengan kelompok pemberontak menjadikan pemerintah Khartoum mempertahankan eksistensi kelompok milisi ini. Samapai sekarang eksistensi milisi ini masih dimanfaatkan oleh pemerintah Sudan untuk kepentingan-kepentingan tertentu termasuk mengeliminasi gerakan pemberontak bersenjata.

D. Hubungan Pemerintah Sudan dengan Darfur

Darfur yang luasnya seperlima wilayah Sudan atau setara dengan luas Pulau Kalimantan terletak di Sudan bagian barat. Secara geografis bagian utara Darfur berupa padang pasir yang berbatasan dengan gurun Libya sementara di sebelah selatan berupa pegunungan. Karena letaknya tersebut akses masuk ke Darfur cukup sulit karena harus melalui padang pasir yang luas dan pegunungan Jabel Marra yang membentang. Kondisi geografis yang terisolasi inilah yang menyebabkan Pemerintah Sudan menjadi kurang memperhatikan kawasan Darfur.

Atas dasar alasan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang dimiliki Pemerintah Sudan dalam mengelola Darfur maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membagi Darfur menjadi tiga wilayah. Usulan pembagian

wilayah Darfur pertama kali muncul pada masa pemerintahan Sadiq Al Mahdi tahun 1986. Namun pembagiannya baru diresmikan pada tahun 1994 semasa Presiden Omar Hassan Bashir memerintah Sudan. Kawasan Darfur dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Darfur Barat, Darfur Utara dan Darfur Selatan.

Namun rupanya pembagian tiga wilayah Darfur tersebut belum mampu memperbaiki wilayah yang ada karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola Darfur. Melihat pembangunan yang terjadi di Darfur terlihat daerah ini cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat pembangunan di Khartoum (ibukota Sudan). Hampir separuh tingkat rata-rata ekonomi masyarakat Darfur Barat masih hidup dibawah garis kemiskinan. Prosentase masyarakat Darfur Barat 52% rakyat miskin, menengah 30% dan hanya 18% masyarakat yang sudah mapan.⁴³ Hal ini menunjukkan pemerintah pusat Sudan masih kurang memperhatikan pembangunan kawasan ini. Pemerintah Sudan seolah menyerahkan Darfur sepenuhnya permasalahan masyarakat Darfur kepada pemerintah daerah Darfur sendiri.

Pemerintah daerah Darfur yang baru terbentuk belum memiliki cukup kekuatan yang mengatasi persoalan dan masalah yang sering muncul dikawasan tersebut. Bentrokan yang terjadi antar etnis di Darfur ditambah lagi dengan dianutnya sistem pemusatann kekuasaan. Di mana sebagian besar hasil ekonomi di daerah didistribusikan ke pusat baru selanjutnya dibagi ke masing-masing daerah masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut kian memperkaya pemerintah pusat Sudan. Rendahnya tingkat pendidikan dan

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian kian memparah kondisi masyarakatnya sehingga rentan akan masalah sosial dan keamanan di Darfur.

Ada beberapa alasan penting yang mendasari pemerintah Sudan kurang memperhatikan pembangunan daerah-daerah Sudan termasuk Darfur. Hal tersebut karena masalah geografis dan minimnya infrastruktur di banyak daerah di Sudan, pemerintah Sudan juga disibukkan dengan masalah politik dan kekuasaan yang memang rawan terjadi kudeta, serta masalah pemberontakan (SPLM/A) yang terjadi di kawasan Sudan Selatan. Konflik akibat diskriminasi etnis dan agama di Sudan Selatan yang sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan Sudan tahun 1956 ini akhirnya menguras perhatian penuh Pemerintah Sudan.

Darfur yang juga memiliki potensi konflik yang cukup tinggi cenderung kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kurang tanggapnya pemerintah Sudan dalam menangani konflik ini secara positif. Rawannya konflik bersenjata di Darfur ini salah satunya karena masih kuatnya eksistensi milisi Arab yang berperang melawan masyarakat Darfur ditambah keengganan pihak pemerintah untuk melucuti senjata milisi Janjaweed tersebut memunculkan asumsi bahwa pemerintah rupanya berada dibalik gerakan mereka. Kondisi ini yang akhirnya memperparah persepsi buruk masyarakat Darfur terhadap pemerintah pusat Sudan.

Hingga akhirnya konflik Darfur ini kian membesar dan menyeret pemerintah Sudan dalam putaran konflik etnis ini. Akibatnya puluhan ribu orang

meninggal dan jutaan lainnya mengungsi ke negara lain. Masalah kemanusiaan dan pengungsian yang melanda Darfur ini akhirnya menarik perhatian dunia internasional dan mengikutsertakan banyak aktor untuk terlibat dalam konflik ini. Kondisi ini membuat Pemerintah Sudan merasa terganggu dengan konflik yang berkejolak tersebut karena dunia internasional terus mendesak pemerintah Bashir untuk segera menyelesaikan konflik Darfur ini.